

## Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Papua

Papua mula-mula ditemukan pelaut Portugis, Jorge de Meneses pada tahun 1526, menyusul tahun 1545, penjelajah Spanyol yang bernama Ynigo Ortiz de Retes (Ani Setianingsih 2000:24), Ynigo Ortiz menemukan hamparan pulau di pesisir utara di dunia yang merupakan pulau terbesar kedua dan diberi nama "Nueve Guinea". Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama menjadi "Irian Jaya". "Irian" adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan "Jaya" artinya kejayaan atau kemenangan. Namun penduduk asli lebih menyukai nama Papua Barat. Tahun 1999 Presiden Indonesia, Abdurrachman Wahid, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis asli sama dengan orang-orang di Papua Timur, (Papua New Guinea/PNG) dan juga sama dengan orang-orang Malenesia lainnya di Pasifik.

Jayapura sebagai ibukota propinsinya, berlokasi di pesisir sebelah utara, diperkirakan terdapat 249 bahasa di Papua Barat. Puncak Gunung Jaya Wijaya dengan ketinggian lebih dari 16.000 kaki adalah gunung tertinggi ke-3 di dunia yang berada pada lintasan garis khatulistiwa yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan Andes.

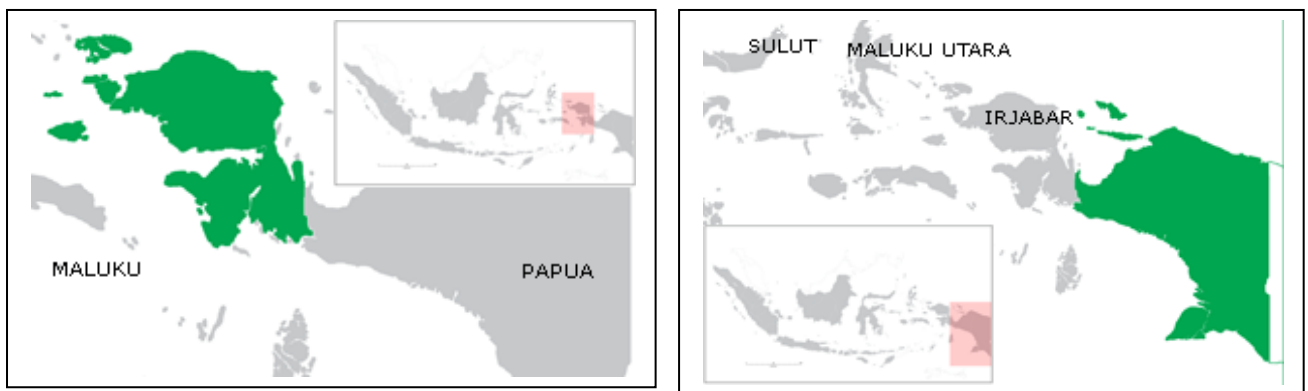


Gambar 2

Gunung Jayawijaya dengan salah satu puncak tertingginya **Carstensz  
Pyramide**

*Sumber :<http://reserveboyz.blogspot.com/>*

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Pasal 1 (a) disebutkan bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; Secara administratif wilayah Papua telah dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat.



Gambar 3  
Pemekaran Papua

Papua Barat adalah suatu tempat yang spektakuler dengan beragam keindahan; lereng- lereng gunung yang curam dan hutan-hutan lebat dengan satwa yang unik di dunia. Banyak tempat yang belum dapat dijamah dan dimasuki oleh dunia luar, peradaban jaman batu juga masih dapat ditemukan di sini.



Gambar 4  
Alam Papua  
*Sumber Kal Muller, 2004*

Masyarakat penduduk Papua Barat berasal dari suku bangsa asli Papua, yang terdiri atas beberapa suku bangsa. Berdasarkan hasil sensus penduduk BPS tahun 2000, proporsi suku asli Papua mencapai sekitar 83% dari total 700.000 penduduknya. Sementara suku bangsa pendatang seperti Jawa, Bugis, Madura dan Batak mencapai 17%. Apabila dibandingkan dengan propinsi Papua, Proporsi etnis pendatang di Papua Barat lebih besar. presentasi etnis pendatang di wilayah Papua hanya mencapai 12%.

Keterbukaan di wilayah Papua Barat secara kultural dengan wilayah lain sudah terjadi sejak abad ke-7 melalui pedagang Persia dan India dan pada abad ke 9 dengan Cina. Pengaruh Islam masuk setelah Papua menjadi kekuasaan politik Kesultanan Tidore pada abad ke-15 masehi. Semula pengaruh kesultanan tersebut hanya berkisar di sekitar kepulauan Raja Ampat, tapi lambat laun masuk ke wilayah Pantai Barat pesisir utara Papua. Sejalan dengan itu bangsa Barat mulai menyentuh tanah Papua melalui Antonio d'Abrau, ekspedisi barat ini turut memulai penyebaran agama Kristen di Papua.

Dalam Kompas tanggal 4 Maret 2009 disebutkan bahwa secara umum bisa dikatakan perbedaan karakter budaya pesisir dan pedalaman memang sangat kental di wilayah ini. Penduduk yang mendiami kawasan pesisir cenderung lebih bersifat terbuka karena lebih banyak berhubungan dengan dunia luar. Banyaknya pendatang dari berbagai etnis dan agama mempengaruhi daerah ini.

Berbeda halnya dengan masyarakat pedalaman yang mendiami dataran rendah dan lereng pegunungan di Sorong Manokwari, adat istiadat di wilayah ini

dijalankan secara ketat. Curiga terhadap orang asing yang belum dikenal merupakan hal yang lumrah, pembalasan dendam melalui perang suku dinilai sebagai tindakan heroisme yang bertujuan mencari keseimbangan social.

Adanya fenomena dinamis masyarakat Papua yang ingin terus mengembangkan diri dan berubah merupakan bagian dari kultur Papua yang kental rasa kesukuannya. Sayangnya keinginan berubah dan mengembangkan diri ini berkembang menjadi tidak terkendali.

Papua merupakan salah satu daerah konflik separasi, atau pemisahan diri di Indonesia, seperti Aceh di masa lalu. Namun, tidak seperti di Aceh, konflik separasi disini memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri. Mengingat keberhasilan perdamaian di Aceh menggoda dan mendorong kita untuk meneruskannya di Papua. Tetapi, keberhasilan di Aceh tidak mudah begitu saja kita terapkan di Papua, karena perbedaan karakteristik dan dinamika konfliknya, meskipun berbagai peluang perdamaian tetap ada.

Konflik separasi di Papua telah berlangsung cukup lama, sejak Papua pertama kali bergabung secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, tahun 1969. Terdapat kelompok-kelompok dan sejumlah tokoh masyarakat di Papua tidak mau bergabung, menginginkan Papua berdiri sebagai negara sendiri. Sebagian besar kelompok dan tokoh itu kemudian bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang hingga kini masih eksis dan terus berjuang, bahkan dengan kekerasan senjata dalam memperjuangkannya.

Secara resmi Papua memang bagian Indonesia, dan PBB pun telah mengakuinya dalam penggabungan tahun 1969 itu. Bersama dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh Papua lain yang mendukung penggabungan itu, pemerintah Indonesia sejak itu melancarkan berbagai pembangunan ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan kebudayaan disana, sebagaimana dilakukan di daerah-daerah lainnya. Hanya saja, respon, dinamika dan keberhasilannya sangat berbeda dengan daerah-daerah lain, salah satu sebab utamanya karena masih adanya resistensi dan konflik separasi disana.

Konflik separasi di Papua, dengan OPM sebagai motor penggerak utama, masih terus berlangsung hingga sekarang, belum mendapat penanganan perdamaian khusus dari pemerintah Indonesia. Sesudah tahun 1969 itu, pemerintah Orde Baru melancarkan pembangunan terpusat, atau tersentralisasi, yang dalam pelaksanaannya di Papua dilakukan sambil terus menerus mengawasi dan menekan konflik yang muncul, terutama terhadap OPM, seringkali disertai

dengan kontak senjata. Pendekatan keamanan bersenjata ini terus dilakukan hingga akhir pemerintah Orde Baru, tahun 1998.

Selain itu, akibat sentralisasi pembangunan, atau *growth pole* dan ekstraksi sumberdaya berlangsung selama ini, juga muncul konflik lain disebabkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial-ekonomi di masyarakat. Salah satu paling menonjol adalah konflik antara pendatang (*migrant*) dan penduduk asli Papua. Masalah ini menjadi bagian tersendiri dalam konflik yang berlangsung di Papua selama ini.

Masalah kesenjangan dan ketidakadilan, diakibatkan oleh sentralisasi pembangunan berlangsung selama ini, menambah bobot masalah konflik di Papua, bukan hanya terkait masalah separasi, atau kelompok OPM saja, tetapi juga terkait dengan masalah resistensi dan gerakan politik lain menuntut keadilan sosial ekonomi, yanguntutannya sangat beragam di masyarakat Papua. Berkaitan dengan kelompok-kelompok ini, gerakan dan resistensi politik cukup beragam ini, kita juga penting mencermatinnya untuk pembangunan perdamaian di Papua.

Untuk selanjutnya makalah ini akan dikembangkan berdasarkan 2 fokus utama pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Papua
2. Akhir jawaban Penyelesaian Konflik

## 1. Mengenai Nama Papua



Gambar 5  
Peta Lama Papua

Sumber UNIPA - ANU - UNCEN PapuaWeb Project, 2002-2004

Pada sekitar Tahun 200 M, ahli Geography bernama Ptolamy menyebut Papua dengan nama LABADIOS. Maksud apa disebut demikian, belum diketahui. Pada akhir tahun 500 M, pengarang Tiongkok bernama Ghau Yu Kua memberi nama TUNGKI, dan pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama JANGGI. Nama Tungki dan Janggi telah mengundang berbagai pendapat, kemungkinan nama TUNGKI yang sudah berubah dalam sebutannya menjadi Janggi atau sebaliknya. Pada akhir tahun 1300, Majapahit menggunakan dua nama, yakni WANIN dan SRAM. Nama Wanin, tentu tidak lain dari semenanjung Onin di daerah Fak-Fak dan SRAM, ialah pulau Seram di Maluku. Ada kemungkinan, budak yang dibawa dan dipersembahkan kepada Majapahit berasal dari Onin dan yang membawanya ke sana adalah orang Seram dari Maluku, sehingga dua nama ini disebut. (<http://digoel.wordpress.com/2008/01/06/tentang-nama-papua/> )

Selanjutnya masih berdasarkan sumber yang sama disebutkan bahwa Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai PAPA-UA yang sudah berubah dalam sebutan menjadi PAPUA. Pada tahun 1545, Ynigo Ortiz de Retez memberi nama NUEVA GUINEE dan ada pelaut lain yang memberi nama ISLA DEL ORO yang artinya Pulau Emas. Nama Nueva Guinee kemudian di-Belanda-kan menjadi NIEUW GUINEA. Pada tahun 1956, Belanda merubah nama Nieuw Guinea menjadi NEDERLANDS NIEUW GUINEA. Sebelum Ortiz Antonio

d'Abrau tahun 1551, pimpinan armada laut Portugis itu menemukan pulau Papua lewat utara dan memberi nama "Os Papuas" sumber lain menulis kata Papua konon berasal dari bahasa Melayu "pua-pua" artinya keriting (Kompas, 2009:269)

Nama Irian adalah satu nama lain yang pernah disandang oleh Papua, dan mengandung arti politik. Frans Kaisiepo, almarhum, orang yang pertama mengumumkan nama ini pada konferensi di Malino-Ujung Pandang pada tahun 1945, antara lain berkata: "Perubahan nama Papua menjadi Irian, kecuali mempunyai arti historis, juga mengandung semangat perjuangan: IRIAN artinya Ikut Republik Indonesia Anti Nederland". (Buku PEPERA 1969 terbitan tahun 1972, hal. 107-108). Kemudian seperti yang sudah ditulis di atas Pada tahun 1973 propinsi ini berubah nama menjadi "Irian Jaya". "Irian" adalah kata Indonesia untuk New Guinea, dan "Jaya" artinya kejayaan atau kemenangan. Namun penduduk asli lebih menyukai nama Papua Barat. Tahun 1999 Presiden Indonesia, Abdurrachman Wahid, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua Barat. Papua Barat memiliki etnis asli sama dengan orang-orang di Papua Timur, (Papua New Guinea/PNG) dan juga sama dengan orang-orang Malenesia lainnya di Pasifik.

## **2. Masyarakat Papua dilihat dari sisi Sosial Budaya**

Seperti yang sudah dipaparkan dimuka, masyarakat Papua yang mendiami daerah pesisir lebih terbuka terhadap adanya pengaruh dari luar, Sudah sejak lama ujung barat laut Irian dan seluruh pantai utara penduduknya dipengaruhi oleh penduduk dari kepulauan Maluku (Ambon, Ternate, Tidore, Seram dan Key), maka adalah tidak mengherankan apabila suku-suku bangsa disepanjang pesisir pantai (Fak-Fak, Sorong, Manokwari dan Teluk Cenderawasih) lebih terbuka menerima pengaruh dari luar. Zending atau misi kristen Protestan dari Jerman (Ottow & Geissler) tiba di pulau Mansinam Manokwari 5 Februari 1855 untuk selanjutnya menyebarkan ajaran agama disepanjang pesisir pantai utara Irian. Pada tanggal 5 Februari 1935, tercatat lebih dari 50.000 orang menganut agama Kristen Protestan. Kemudian pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda membuka Pos Pemerintahan pertama di Fak-Fak dan Manokwari dan dilanjutkan dengan membuka pos pemerintah di Merauke pada tahun 1902. Dari Merauke aktivitas keagamaan misi katolik dimulai dan pada umumnya disepanjang pantai selatan Irian. Pada tahun 1933 tercatat sebanyak 7.100 orang pemeluk agama

katholik. Pendidikan dasar sebagian besar diselenggarakan oleh kedua misi keagamaan tersebut, dimana guru sekolah dan guru agama umumnya berasal dari Indonesia Timur (Ambon, Ternate, Tidore, Seram, Key, Manado, Sanger-Talau, dan Timor), dimana pelajaran diberikan dalam bahasa Melayu. Pembagian kedua kelompok agama tersebut kelihatannya identik dengan keadaan di Negeri Belanda dimana Kristen Protestan di Utara dan Kristen Katholik di Selatan.

Pada masa penjajahan, Pendidikan mendapat jatah yang cukup besar dalam anggaran pemerintah Belanda, pada tahun-tahun terakhir masa penjajahan, anggaran pendidikan ini mencapai 11% dari seluruh pengeluaran tahun 1961. Akan tetapi pendidikan tidak disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja disektor perekonomian modern, dan yang lebih diutamakan adalah nilai-nilai Belanda dan agama Kristen. Pada akhir tahun 1961 rencana pendidikan diarahkan kepada usaha peningkatan keterampilan, tetapi lebih diutamakan pendidikan untuk kemajuan rohani dan kemasyarakatan. Walaupun bahasa "Melayu" dijadikan sebagai bahasa "Franca" (Lingua Franca), bahasa Belanda tetap diajarkan sebagai bahasa wajib mulai dari sekolah dasar, bahasa-bahasa Inggris, Jerman dan Perancis merupakan bahasa kedua yang mulai diajarkan di sekolah lanjutan.

Pada tahun 1950-an pendidikan dasar terus dilakukan oleh kedua misi keagamaan tersebut. Tercatat bahwa pada tahun 1961 terdapat 496 sekolah misi tanpa subsidi dengan kurang lebih 20.000 murid. Sekolah Dasar yang bersubsidi sebanyak 776 dengan jumlah murid pada tahun 1961 sebanyak kurang lebih 45.000 murid, dan seluruhnya ditangani oleh misi, dan pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib dalam hal ini. Pada tahun 1961 tercatat 1.000 murid belajar di sekolah menengah pertama, 95 orang Irian Belajar diluar negeri yaitu Belanda, Port Moresby, dan Australia dimana ada yang masuk Perguruan Tinggi serta ada yang masuk Sekolah Pertanian maupun Sekolah Perawat Kesehatan (misalnya pada Nederland Nasional Institut for Tropica Agriculture dan Papua Medical College di Port Moresby).

Di tahun 2006 hasil survei Sosial Ekonomi (Susenas) yang dilakukan oleh BPS menunjukkan, sebanyak 73.729 orang dari 432.122 anak Papua berusia 7 – 15 tahun tidak pernah sekolah, adanya kemunduran pendidikan di daerah Papua mengingat ketika masa Belanda di Papua buku-buku pengajaran hingga perabot



kelas dicukup sehingga guru relatif tenang mengajar. Kondisi anak Papua saat ini tidak beranjak dari masa lalu, berpenyakit kulit, serta buta huruf dan angka.

Mengenai kebudayaan penduduk atau kultur masyarakat di Irian Barat dapat dikatakan beraneka ragam, beberapa suku mempunyai kebudayaan yang cukup tinggi dan mengagumkan yaitu suku-suku di Pantai Selatan Irian yang kini lebih dikenal dengan suku "ASMAT" kelompok suku ini terkenal karena memiliki kehebatan dari segi ukir dan tari. Budaya penduduk Irian yang beraneka ragam itu dapat ditandai oleh jumlah bahasa lokal khususnya di Irian Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari suami-isteri Barr dari Summer Institute of Linguistics (SIL) pada tahun 1978 ada 224 bahasa lokal di Irian Barat, dimana jumlah itu akan terus meningkat mengingat penelitian ini masih terus dilakukan. Bahasa di Irian Barat digolongkan kedalam kelompok bahasa Melanesia dan diklasifikasikan dalam 31 kelompok bahasa yaitu: Tobati, Kuime, Sewan, Kauwerawet, Pauwi, Ambai, Turu, Wondama, Roon, Hatam, Arfak, Karon, Kapaur, Waoisiran, Mimika, Kapauku, Moni, Ingkipulu, Pesechem, Teliformin, Awin, Mandobo, Auyu, Sohur, Boazi, Klader, Komoron, Jap, Marind-Anim, Jenan, dan Serki. Jumlah pemakai bahasa tersebut diatas sangat bervariasi mulai dari puluhan orang sampai puluhan ribu orang. Ciri / Karakteristik kesenian asli suatu kelompok masyarakat / suku bangsa dipengaruhi oleh lingkungan alam dimana kelompok tersebut bermukim dan juga dipengaruhi migrasi. Khusus untuk kesenian tradisional Papua, ciri dan karakteristiknya dibentuk oleh kondisi alam yang ada di Papua.



## Gambar 5

### Suku Asmat

**Sumber :** <http://www.ayofoto.com/images/article/126/jayawijaya0015.jpg>

Kondisi alam papua terbagi kedalam 4 zona ekologis, yaitu :

1. **Zona Rawa, Pantai dan Sepanjang Aliran sungai;** meliputi: daerah Asmat, Jagai, Marind-anim, Mimika dan Waropen.
2. **Zona Dataran Tinggi;** meliputi: orang Dani, Ngalun dan orang Ekari/Mee.
3. **Zona Kaki Gunung dan Lembah-Lembah Kecil;** meliputi : daerah Sentani, Nimboran, Ayamaru dan orang Muyu.
4. **Zona Dataran Rendah dan Pesisir;** meliputi : Sorong sampai Nabire, Biak dan Yapen.

Setiap suku bangsa yang mendiami zona tersebut di atas memiliki unsur kesenian, namun unsur kesenian dari setiap suku bangsa tersebut tidak sama ( satu suku dengan suku lainnya berbeda) sesuai dengan kondisi alam dimana suku itu bermukim. Mengapa seni dipengaruhi alam ? Karena *seni* adalah peniruan alam dalam bermacam-macam bentuk yang indah dan menyenangkan. Selain itu, seni merupakan kreatifitas dari seseorang untuk menciptakan suatu karya yang akhirnya diakui oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal demikian diperkuat oleh **teori Plato**, yaitu : seni yang dihasilkan sifatnya naturalistik, artinya ketepatan bentuk alam sangat diutamakan dalam enciptaan. Sedangkan menurut **teori imitasi** batasan seni kurang lebih berbunyi sebagai berikut :

- a. Seni adalah peniruan alam dengan segala segi-seginya.
- b. Seni adalah suatu kemahiran atau kemampuan meniru alam menjadi bentuk-bentuk yang indah.
- c. Seni adalah peniruan alam dengan segala segi-seginya menjadi bentuk yang menyenangkan. (Enos Rumansa, Jurnal Antropologi Papua tahun 2003)

Khusus di Papua, kesenian tidak terlepas dari unsur lain. Misalnya setiap upacara adat, seperti : upacara yang diselenggarakan dalam upacara lingkaran hidup individu / manusia (*life cycle rites*), upacara pembukaan lahan baru, panen, bepergian dan lain-lainnya selalu disertai dengan kegiatan seni ( seni tari, musik / instrumen, vokal, sastra dan lainnya). Dalam upacara adat disertai dengan tarian dan nyanyian-nyanyian adat serta diiringi instrumen tradisional. Perlu diketahui pula bahwa kesenian daerah Papua mengalami perubahan akibat terjadinya kontak.

Salah satu kesenian yang merupakan cita karya masyarakat Papua adalah tarian Yospan. Yospan adalah salah satu tarian pergaulan yang berasal dari dua daerah, yakni Biak dan Yapen-Waropen. Awalnya, yospan terdiri dari tarian pergaulan yosim dan pancar, dua tarian berbeda yang akhirnya dipadu menjadi satu. Dalam pementasan yosim, yang berasal dari Yapen-Waropen, para penari juga mengajak serta warga lainnya untuk hanyut dalam lagu-lagu yang dibawakan kelompok penyanyi berikut pemegang perangkat musiknya. Perangkat musik yang digunakan sangat sederhana, terdiri dari cuku lele dan gitar yang merupakan alat musik dari luar Papua. Juga ada alat yang berfungsi sebagai bas dengan tiga tali. Talinya biasa dibuat dari lintingan serat sejenis daun pandan yang banyak ditemui di hutan-hutan daerah pesisir Papua.



Gambar 6  
Honai

**Sumber :** <http://www.ayofoto.com/images/article/126/jayawijaya0015.jpg>

Jika berbicara mengenai kehidupan perekonomian Masyarakat Papua, Warga Papua terpengaruh pola hidup berburu, meramu dan berladang berpindah. Kentanya akar budaya subsistem membuat masyarakat Papua sulit mengadopsi model ekonomi pasar. Secara tradisional, tipe pemukiman masyarakat Papua dapat dibagi kedalam 4 kelompok dimana setiap tipe mempunyai corak kehidupan sosial ekonomi dan budaya tersendiri.

1. **Penduduk pesisir pantai;** Penduduk ini mata pencaharian utama sebagai Nelayan disamping berkebun dan meramu sagu yang disesuaikan dengan lingkungan pemukiman itu. Komunikasi dengan kota dan masyarakat luar sudah tidak asing bagi mereka.
2. **Penduduk pedalaman yang mendiami dataran rendah;** Mereka termasuk peramu sagu, berkebun, menangkap ikan disungai, berburu dihuta disekeliling lingkungannya. Mereka senang mengembara dalam kelompok kecil. Mereka ada yang mendiami tanah kering dan ada yang mendiami rawa dan payau serta sepanjang aliran sungai. Adat Istiadat mereka ketat dan selalu mencurigai pendatang baru.
3. **Penduduk pegunungan yang mendiami lembah;** Mereka bercocok tanam, dan memelihara babi sebagai ternak utama, kadang kala mereka berburu dan memetik hasil dari hutan. Pola pemukimannya tetap secara berkelompok, dengan penampilan yang ramah bila dibandingkan dengan penduduk tipe kedua (2). Adat istiadat dijalankan secara ketat dengan "Pesta Babi" sebagai simbolnya. Ketat dalam memegang dan menepati janji. Pembalasan dendam merupakan suatu tindakan heroisme dalam mencari keseimbangan sosial melalui "Perang Suku" yang dapat diibaratkan sebagai pertandingan atau kompetisi. Sifat curiga terhadap orang asing ada tetapi tidak seketat penduduk tipe 2 (kedua).
4. **Penduduk pegunungan yang mendiami lereng-lereng gunung;** Melihat kepada tempat pemukimannya yang tetap di lereng-lereng gunung, memberi kesan bahwa mereka ini menempati tempat yang strategis terhadap jangkauan musuh dimana sedini mungkin selalu mendeteksi setiap makhluk hidup yang mendekati pemukimannya. Adat istiadat mereka sangat ketat, sebagian masih "KANIBAL" hingga kini, dan bunuh diri merupakan tindakan terpuji bila melanggar adat karena akan menghindarkan bencana dari seluruh kelompok masyarakatnya. Perang suku merupakan aktivitas untuk pencari keseimbangan sosial, dan curiga pada orang asing cukup tinggi juga.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat Papua satu diantaranya adalah dengan melakukan transmigrasi (Ekspedisi Papua 2009:262). Pada tahun 1966, pemerintah mengirimkan 164 keluarga transmigrasi pertama ke Merauke. Bersamaan dengan transmigran, juga datang para pedagang dari Bugis, disusul suku-suku lain yang lebih maju dalam bidang pendidik dan berproduksi. Yang terjadi adalah kompetisi

yang sengit dan penduduk local yang akan tersisih. Para transmigran yang diharapkan bias mengajari penduduk local dengan ilmu bercocok tanam, berdagang dan menabung justru beralih menjadi pesaing yang sengit. Akhirnya transformasi dari meramu ke pola hidup berproduksi yang dicoba diterapkan tidak berhasil. Kentalnya akar budaya subsistem bagi warga asli Papua membuat Papua sulit mengadopsi model ekonomi pasar dengan pembagian kerja yang sangat jelas dan ketat.

Jika kita mengacu kepada teori Marx tentang antikebudayaan Marx melihat bahwa kaum borjuis merupakan kaum yang memanfaatkan penemuan-penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperluas pusat industri maupun bisnisnya. Menurut Marx, masyarakat yang dikuasai proses kehidupan yang demikian akan mengalihkan ciri kehidupannya yang ditandai oleh kebudayaan humanis menjadi semata-mata material dan pada gilirannya akan memunculkan kelas-kelas yang kontradiktif (Muji Sutrisno, 2005:21) begitupun halnya dengan kondisi di Papua munculnya istilah "amber" lurus dan "Komin" keriting merupakan gambaran adanya dua kelompok yang berhasil dalam bidang ekonomi dalam hal ini adalah kaum pendatang (Amber) dan kelompok yang hanya sebagai penonton saja yaitu masyarakat Papua (Komin).

Adanya fenomena dinamis masyarakat Papua yang ingin terus mengembangkan diri dan berubah merupakan bagian dari kultur Papua yang kental rasa kesukuannya. Sayangnya keinginan berubah dan mengembangkan diri ini berkembang menjadi tidak terkendali. Curiga terhadap orang asing yang belum dikenal merupakan hal yang lumrah, pembalasan dendam melalui perang suku dinilai sebagai tindakan heroisme yang bertujuan mencari keseimbangan social.

## **A. Perjalanan Integrasi di Papua**

### **1. Papua dalam NKRI**

Papua merupakan wilayah NKRI yang banyak mengalami jatuh bangun dalam proses pengakuan dari dunia internasional. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah

satu provinsi Kerajaan Belanda, sama dengan daerah-daerah lainnya. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Papua bagian barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Papua bagian barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, namun Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Papua bagian barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Papua bagian barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian *New York Times* melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, namun tidak menyebutkan kandungan emas ataupun tembaga.

Karena usaha pendidikan Belanda, pada tahun 1959 Papua memiliki perawat, dokter gigi, arsitek, teknisi telepon, teknisi radio, teknisi listrik, polisi, pegawai kehutanan, dan pegawai meteorologi. Kemajuan ini dilaporkan kepada PBB dari tahun 1950 sampai 1961. Selain itu juga diadakan berbagai pemilihan umum untuk memilih perwakilan rakyat Papua dalam pemerintahan, mulai dari tanggal 9 Januari 1961 di 15 distrik. Hasilnya adalah 26 wakil, 16 di antaranya dipilih, 23 orang Papua, dan 1 wanita. Dewan Papua ini dilantik oleh gubernur Platteel pada tanggal 1 April 1961, dan mulai menjabat pada 5 April 1961. Pelantikan ini

dihadiri oleh wakil-wakil dari Australia, Britania Raya, Perancis, Belanda, dan Selandia Baru. Amerika Serikat diundang tapi menolak.

Dewan Papua bertemu pada tanggal 19 Oktober 1961 untuk memilih sebuah komisi nasional untuk kemerdekaan, bendera Papua, lambang negara, lagu kebangsaan ("Hai Tanahkoe Papua"), dan nama Papua. Pada tanggal 31 Oktober 1961, bendera Papua dikibarkan untuk pertama kali dan manifesto kemerdekaan diserahkan kepada gubernur Platteel. Belanda mengakui bendera dan lagu kebangsaan Papua pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan-peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno menanggapi pembentukan Dewan Papua ini dengan menyatakan Trikora di Yogyakarta, yang isinya adalah:

1. Gagalakan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, namun gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jendral A. H. Nasution pergi ke Moskwa, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual-beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dollar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan.

Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Papua bagian barat ke Indonesia karena Bureau of European Affairs di Washington, DC menganggap hal ini akan "menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat". Tapi pada bulan April 1961, Robert Komer dan McGeorge Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim Perang Dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan AS.

Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain 41 Helikopter MI-4 (angkutan ringan), 9 Helikopter MI-6 (angkutan berat), 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 pesawat buru sergap MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 Kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet dan 1 buah Kapal penjelajah kelas Sverdlov (yang diberi nama sesuai dengan wilayah target operasi, yaitu KRI Irian). Dari jenis pesawat pengebom, terdapat sejumlah 22 pesawat pembom ringan Ilyushin Il-28, 14 pesawat pembom jarak jauh TU-16, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi dengan persenjataan peluru kendali anti kapal (rudal) *air to surface* jenis AS-1 Kennel. Sementara dari jenis pesawat angkut terdapat 26 pesawat angkut ringan jenis IL-14 dan AQvia-14, 6 pesawat angkut berat jenis Antonov An-12B buatan Uni Soviet dan 10 pesawat angkut berat jenis C-130 Hercules buatan Amerika Serikat.

Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Perancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB U Thant meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usul tentang penyelesaian masalah status Papua bagian barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu dua tahun.

Pada tanggal 27 Desember 1958, presiden Soekarno mengeluarkan UU nomor 86 tahun 1958 yang memerintahkan dinasionalisasikannya semua perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi seperti:

1. Perusahaan Perkebunan
2. Netherlansche Handels Mattscapij
3. Perusahaan Listrik
4. Perusahaan Perminyakan
5. Rumah Sakit (CBZ) menjadi RSCM

Dan kebijakan-kebijakan lain seperti:

1. Memindahkan pasar pelelangan tembakau Indonesia ke Bremen (Jerman Barat)
2. Aksi mogok buruh perusahaan Belanda di Indonesia



3. Melarang KLM (maskapai penerbangan Belanda) melintas di wilayah Indonesia
4. Melarang pemutaran film-film berbahasa Belanda

Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962, ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul yang membawa Komodor Yos Sudarso, dan KRI Harimau yang dinaiki Kolonel Sudomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondomulyo, berpatroli pada posisi 04-49° LS dan 135-02° BT. Menjelang pukul 21.00, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu, terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, dimana berarti kapal itu sedang berhenti. 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut.

Kapal Belanda menembakan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau. Kolonel Sudomo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, namun tidak mengenai sasaran. Akhirnya, Yos Sudarso memerintahkan untuk mundur, namun kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus membelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki KRI Macan Tutul. Komodor Yos Sudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran".

Pasukan Indonesia dibawah pimpinan Mayjen Soeharto melakukan operasi infiltrasi udara dengan menerjunkan penerbang menembus radar Belanda. Mereka diterjunkan di daerah pedalaman Papua bagian barat. Penerjunan tersebut menggunakan pesawat angkut Indonesia, namun, operasi ini hanya mengandalkan faktor pendadakan, sehingga operasi ini dilakukan pada malam hari. Penerjunan itu pada awalnya dilaksanakan dengan menggunakan pesawat angkut ringan C-47 Dakota yang kapasitas 18 penerjun, namun karena keterbatasan kemampuannya, penerjunan itu dapat dicegat oleh pesawat pemburu Neptune Belanda.

Pada tanggal 19 Mei 1962, sekitar 81 penerjun payung terbang dari Bandar Udara Pattimura, Ambon, dengan menaiki pesawat Hercules menuju daerah sekitar Kota Teminabuan untuk melakukan penerjunan. Saat persiapan keberangkatan,

komandan pasukan menyampaikan bahwa mereka akan diterjunkan di sebuah perkebunan teh, selain itu juga disampaikan sandi-sandi panggilan, kode pengenalan teman, dan lokasi titik kumpul, lalu mengadakan pemeriksaan kelengkapan perlengkapan anggotanya sebelum masuk ke pesawat Hercules. Pada pukul 03.30 WIT, pesawat Hercules yang dikemudikan Mayor Udara T.Z. Abidin terbang menuju daerah Teminabuan.

Dalam waktu singkat, proses pendaratan 81 penerjun payung selesai dan pesawat Hercules segera meninggalkan daerah Teminabuan. Keempat mesin Allison T56A-15 C-130B Hercules terbang menanjak untuk mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh pesawat Neptune milik Belanda. TNI Angkatan Laut kemudian mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut.

Karena kekhawatiran bahwa pihak komunis akan mengambil keuntungan dalam konflik ini, Amerika Serikat mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia. Karena usaha ini, tercapailah persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Pemerintah Australia yang awalnya mendukung kemerdekaan Papua juga mengubah pendiriannya dan mendukung penggabungan dengan Indonesia atas desakan AS.

Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Soebandrio, dan Belanda diwakili oleh Jan Herman van Roijen dan C.W.A. Schurmann. Isi dari Persetujuan New York adalah:

- Belanda akan menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia.
- Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan.
- Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah.
- UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan.

- Indonesia, dengan bantuan PBB, akan memberikan kesempatan bagi penduduk Papua bagian barat untuk mengambil keputusan secara bebas melalui
  1. musyawarah dengan perwakilan penduduk Papua bagian barat
  2. penetapan tanggal penentuan pendapat
  3. perumusan pertanyaan dalam penentuan pendapat mengenai kehendak penduduk Papua untuk
    - tetap bergabung dengan Indonesia; atau
    - memisahkan diri dari Indonesia
  4. hak semua penduduk dewasa, laki-laki dan perempuan, untuk ikut serta dalam penentuan pendapat yang akan diadakan sesuai dengan standar internasional
- Penentuan pendapat akan diadakan sebelum akhir tahun 1969.

Pada tanggal 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian barat kepada Indonesia. Ibukota Hollandia dinamai Kota Baru dan pada 5 September 1963, Papua bagian barat dinyatakan sebagai "daerah karantina". Pemerintah Indonesia membubarkan Dewan Papua dan melarang bendera Papua dan lagu kebangsaan Papua. Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak di Papua, dan melahirkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1965. Untuk meredam gerakan ini, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia melakukan berbagai tindakan pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pemboman udara. Menurut Amnesty International, lebih dari 100.000 orang Papua telah tewas dalam kekerasan ini. OPM sendiri juga memiliki tentara dan telah melakukan berbagai tindakan kekerasan.

Sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement) dengan melalui suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Papua (Irian Jaya) diserahkan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Isi perjanjian New York (*New York Agreement*) antara lain adalah sebagai berikut. **Pertama**, apabila badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) telah membenarkan persetujuan atau perjanjian itu melalui Rapat Umum, maka Belanda segera menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya (Papua) kepada UNTEA. **Kedua**, terhitung sejak tanggal 1 Mei 1963 UNTEA sebagai yang memikul tanggung jawab Administrasi Pemerintah di Irian

Jaya (West Papua) selama 6-8 bulan dan menyerahkannya kepada Indonesia. **Ketiga**, pada Akhir tahun 1969, dibawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB dilakukan Act of Free Choice dalam mana orang Irian Jaya (West Papua) dapat menentukan penggabungan pasti tanah mereka dengan Indonesia atau menentukan Status atau Kedudukan yang Lain (Merdeka Sendiri). **Keempat**, Indonesia dalam tenggang waktu tersebut diharuskan mengembangkan/membangun kebersamaan orang Irian Jaya (Papua) untuk nantinya pada akhir tahun 1969 dapat menentukan pilihannya. (<http://www.geocities.com/opm-irja>)

Pada tahun 1969, diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang diatur oleh Jenderal Sarwo Edhi Wibowo. Menurut anggota OPM Moses Werror, beberapa minggu sebelum Pepera, angkatan bersenjata Indonesia menangkap para pemimpin rakyat Papua dan mencoba membujuk mereka dengan cara sogokan dan ancaman untuk memilih penggabungan dengan Indonesia.

Pepera ini disaksikan oleh dua utusan PBB, namun mereka meninggalkan Papua setelah 200 suara (dari 1054) untuk integrasi. Hasil PEPERA adalah Papua bergabung dengan Indonesia, namun keputusan ini dicurigai oleh Organisasi Papua Merdeka dan berbagai pengamat independen lainnya. Walaupun demikian, Amerika Serikat, yang tidak ingin Indonesia bergabung dengan pihak komunis Uni Soviet, mendukung hasil ini, dan Papua bagian barat menjadi provinsi ke-26 Indonesia, dengan nama Irian Jaya. Setelah Papua bagian barat digabungkan dengan Indonesia sebagai Irian Jaya, Indonesia mengambil posisi sebagai berikut:

1. Papua bagian barat telah menjadi daerah Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1945 namun masih dipegang oleh Belanda
2. Belanda berjanji menyerahkan Papua bagian barat kepada Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar
3. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah tindakan merebut kembali daerah Indonesia yang dikuasai Belanda
4. penggabungan Papua bagian barat dengan Indonesia adalah kehendak rakyat Papua.

Semenjak tanggal diserahkannya Papua (Irian Jaya) kepada Indonesia, sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia sering dihadapkan dengan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk masalah adalah tantangan terhadap kegiatan Integrasi Politik di West Papua (Irian Jaya). Hal ini secara sangat menonjol tercermin dalam pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang dipimpin oleh Sersan Mayor Permenas Ferry Awom yang merupakan bekas anggota Batalyon Sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers Korps*). Pemberontakan OPM yang Berawal di Manokwari tersebut kemudian menjalar terus keseluruh Kabupaten di Papua (Irian Jaya) yaitu: Biak-Numfor, Sorong, Paniai, Fak-Fak, Yapen Waropen, Merauke, Jayawijaya, Tembagapura, Timika dan Jayapura. Aksi Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Aksi Perlawanan Fisik bersenjata atau aksi militer yang dilakukan secara sporadis.
2. Aksi Penyanderaan.
3. Aksi Demonstrasi Massa.
4. Aksi Pengibaran bendera West Papua.
5. Aksi Penempelan dan Penyebaran Pamflet/Selebaran.
6. Aksi rapat-rapat politik dan pembentukan organisasi perjuangan lokal.
7. Aksi Pelintasan Perbatasan.
8. Aksi Perusakan dan Pembongkaran.
9. Aksi Politik

Kegiatan militer yang dilakukan di Papua (Irian Jaya), bergerak dibawah panji Tentara Nasional Papua (TNP) dengan dibantu oleh aktivitas mata-mata yang bernama Papua Intelligence Service (PIS). Kegiatan politik diluar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka dapat bergerak dengan lebih leluasa dibandingkan dengan kegiatan politik OPM yang di lakukan di Irian Jaya (Papua). Kegiatan Politik Organisasi Papua Merdeka pertama kali hanya terdapat di negeri Belanda dibawah pimpinan Markus Kaisiepo dan Nicholas Jouwe. Dari sinilah OPM memusatkan gerakan dan jaringannya yang kemudian diarahkan ke Afrika, Eropa, Amerika dan Pasifik Selatan. OPM memang dikenal sebagai ornganisasi yang melakukan gerakan sporadik paramiliter dengan sasaran pos-pos militer atau polisi (Laporan Jurnalistik Papua, pertambangan Freeport, daerah penebangan hutan (perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, kadang juga

daerah transmigrasi di Arso. Nama sayap militernya Tentara Pembebasan Nasional (TPN), tapi tidak ada garis komando ataupun koordinasi antar para pemimpin OPM (2009:274).

## **2. Penyelesaian Konflik**

Sumber-sumber konflik Papua menurut LIPI dalam Road Map To Papua (2008:2) dikelompokkan dalam empat isu.

1. Pertama, masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970.
2. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.
4. Isu keempat adalah pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

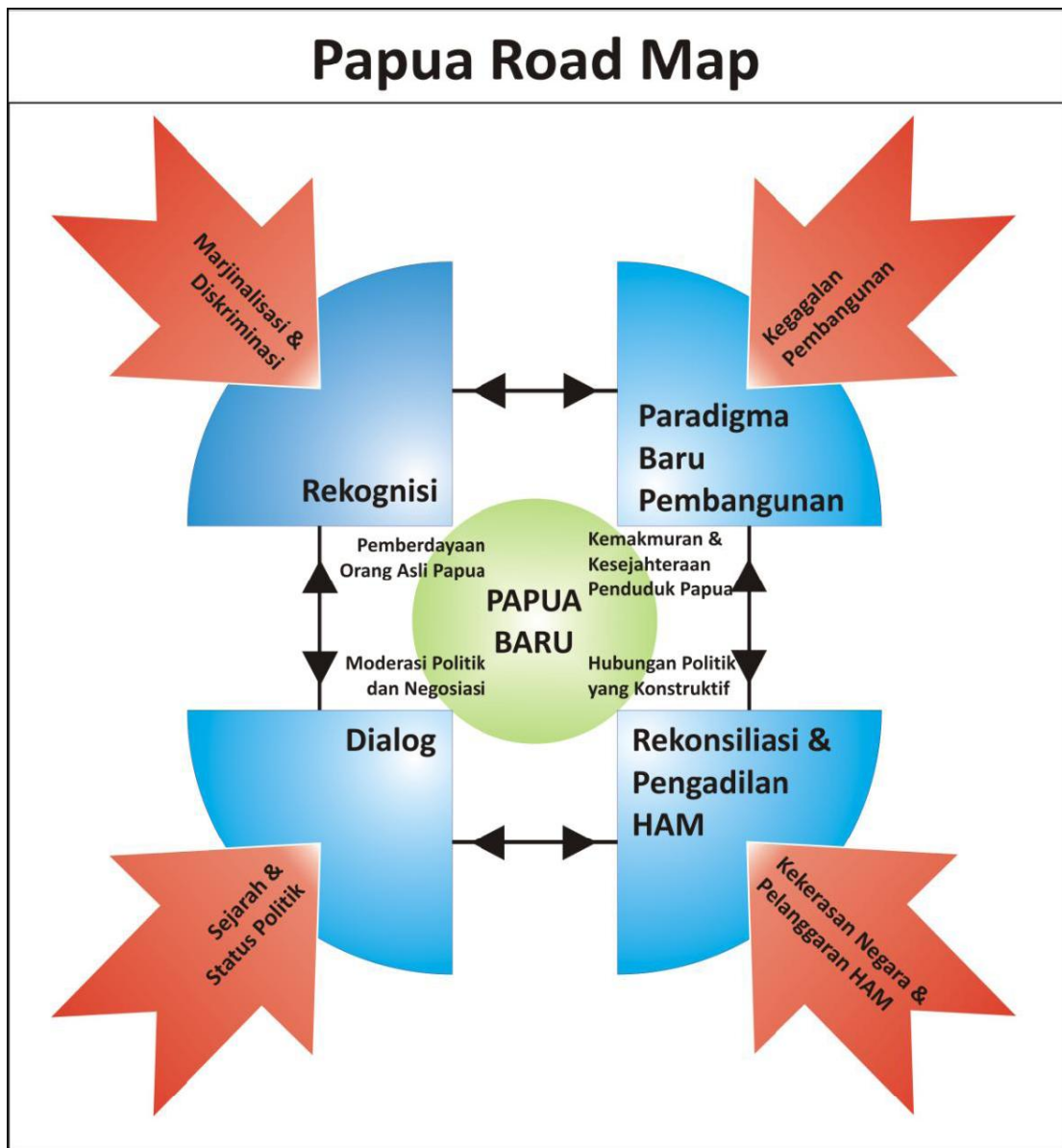
Keempat isu dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. Suasana reformasi, adanya Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang akomodatif, pemerintah pusat yang responsif, serta anggaran Papua yang sangat besar, membuat Tim LIPI percaya bahwa masalah Papua dapat diselesaikan secara adil, damai, dan bermartabat.

Perlu dipahami bahwa masalah dan sumber konflik di Papua sebagian besar adalah warisan masalah rezim-rezim di masa lalu. Sayangnya, alih-alih mengurai sumber-sumber konflik dan menyelesaikannya, rezim-rezim berikutnya cenderung membuat kebijakan dan peraturan transisional yang bersifat *ad hoc*, secara politik dan hukum tidak konsisten serta tidak ramah terhadap suasana hati dan pikiran orang asli Papua. Sementara itu kalangan pemimpin Papua, baik di lembaga negara maupun di tengah masyarakat sipil, tidak memiliki daya tawar yang memadai untuk secara strategis mempengaruhi bentuk dan arah kebijakan Jakarta. Suasana politik didominasi oleh hubungan yang tidak sehat antara nasionalis Indonesia yang menonjolkan "NKRI sebagai harga mati" dan kelompok nasionalis Papua yang juga menekankan "Papua Merdeka sebagai harga mati." Akibatnya energi dan dana baik di Jakarta maupun di Papua dihabiskan untuk langkah-langkah politik yang bersifat reaksioner.

Mengacu pada teori kekuasaan Foucault bahwa kekuasaan merupakan dimensi kehidupan sosial dan tak dapat dielakkan (Mudji Sutrisno, 2005 : 153). Kekuasaan menurut Foucault bukanlah milik tapi merupakan strategi. Kekuasaan adalah soal praktek yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi melainkan juga melalui normalisasi dan regulasi, maka penyelesaian kasus Papua pun diarahkan kesana yaitu melalui proses normalisasi dan regulasi.

Permasalahan pertama berkaitan dengan marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. upaya untuk mengatasinya, dengan kebijakan afirmatif *rekognisi* perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Permasalahan yang kedua adalah berkaitan dengan kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam *paradigma baru pembangunan* yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung.

Masalah utama ketiga adalah adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan *dialog* seperti yang sudah dilakukan untuk Aceh. Isu keempat adalah pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua. Untuk itu, *jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia (HAM) dan pengungkapan kebenaran* adalah pilihan-pilihan untuk penegakkan hukum dan keadilan bagi Papua, terutama korban, keluarganya, dan warga Indonesia di Papua secara umum. Keempat isu dan agenda tersebut di atas dapat dirancang sebagai strategi kebijakan yang saling terkait untuk penyelesaian konflik Papua secara menyeluruh dalam jangka panjang. Suasana reformasi, adanya Undang-undang No 21/2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang akomodatif, pemerintah pusat yang responsif, serta anggaran Papua yang sangat besar.



Bagan Penyelesaian Konflik Papua

Bagaimana kita mempertahankan kondisi di atas supaya tetap terjaga, Teori struktural fungsional mengansumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup dari sistem. Fokus utama dari berbagai pemikir teori fungsionalisme adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Terdapat beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian, antara lain ; faktor



individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.

Bahasan tentang struktural fungsional Parsons ini akan diawali dengan empat fungsi yang penting untuk semua sistem tindakan. Suatu fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Parsons menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

1. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
2. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
- 4.** Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. (Muji Sutrisno, 2005:58)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani Setianingsih (2006) **Namaku Tewelaut**. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
- George A. Mealey (2008) **Grasberg** Mining The Richest and Most Remote Deposit of Copper and Gold in The World, in The Mountain of Irian Jaya, Indonesia. Freeport-McMoran Copper & Gold
- Mudji Sutrisno, dkk (2003) **Teori-Teori Kebudayaan**. Jakarta. Kanisius.
- Laporan Jurnalistik Kompas (2009) **Ekspedisi Tanah Papua**. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara
- Jurnal Antropologi **Papua** Volume 1. No.3 April 2003
- Tim LIPI (2008) **Papua Road Map**
- Depdikbud (1984), **Sejarah Nasional Indonesia**, Jakarta
- Pusjarah TNI (1984), **Pembebasan Papua Barat**
- <http://reserveboyz.blogspot.com/>
- [http://tornquist-art.com/indonesiapage/indonesiaart/asmata\\_women.jpg](http://tornquist-art.com/indonesiapage/indonesiaart/asmata_women.jpg)
- <http://www.geocities.com/opm-irja>
- <http://digoel.wordpress.com/2008/01/06/tentang-nama-papua/>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Tri Komando Rakyat](http://id.wikipedia.org/wiki/Tri_Komando_Rakyat)

# Peta Papua

